

Menumbuhkan Budaya Sadat Risiko (*Risk Culture*)

RADAR SULBAR
JUMAT, 11 MEI 2018

BEBERAPA minggu ini kita dikejutkan dengan kebocoran data pengguna *Facebook* oleh firma Cambridge Analytica.



OLEH:

Yusep Susanto

Auditor di Perwakilan BPKP Sulbar

Dikutip dari *kompas.com*, sebanyak 1 jutaan data pribadi pengguna Indonesia dinyatakan bocor dan masuk daftar yang dicuri firma Cambridge Analytica. Angka ini membuat Indonesia berada di urutan ketiga negara yang paling banyak dicuri datanya dalam skandal ini.

Kendati boleh dibilang cukup besar, menurut pakar Digital Forensik, Ruby Alamsyah, bocornya 1 juta data pengguna Indonesia ini tak memberi dampak begitu signifikan. Sebagian besar data yang dicuri firma Cambridge Analytica tersebut digunakan untuk proses kampanye di Amerika Serikat, dan tak bersinggungan langsung dengan pengguna di Indonesia. "Belum ada dampak besar, karena kita lihat tingkat security awareness di Indonesia ini masih rendah. Biasanya efek dari kejadian seperti ini baru terasa jika sudah mengarah ke tindakan kriminal."

Kebocoran data pengguna merupakan sebuah risiko yang dihadapi oleh Facebook dan kita sebagai pengguna Facebook. Se-

bagai sebuah perusahaan rakasa teknologi, Facebook pasti telah mengidentifikasi risiko kebocoran data pengguna, namun kegiatan pengendalian yang dilakukan Facebook belum optimal sehingga risiko kebocoran data pengguna terjadi.

Sebuah pertanyaan bagi kita semua, apakah kita menyadari bahwa ada risiko data kita di Facebook disalahgunakan oleh pihak lain? Mungkin ada yang menyadari dan ada juga yang tidak peduli dengan risiko tersebut.

Kejadian kebocoran data pengguna Facebook merupakan sebuah ilustrasi sederhana tentang risiko yang kita hadapi dalam menggunakan media sosial.

Risiko merupakan kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan. Sehingga setiap risiko harus diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.

Ketika kita salah dalam mengidentifikasi risiko maka pen-

capaian tujuan akan terkendala oleh risiko yang tidak teridentifikasi tersebut. Begitu juga dengan analisis dan evaluasi risiko, salah kita dalam melakukan analisis dan evaluasi risiko maka penanganan risiko tidak tepat, sehingga menghalangi pencapaian tujuan.

Penerapan manajemen risiko diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa sasaran organisasi tercapai. Sasaran organisasi berpotensi tidak tercapai akibat risiko yang tidak dikelola secara efektif. Penerapan manajemen risiko awalnya hanya pada sektor privat seperti pada industri perbankan, manufaktur, telekomunikasi, dan lainnya.

Namun dewasa ini penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah merupakan hal yang mutlak guna mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang.

Secara payung hukum penerapan manajemen risiko pada sektor publik diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana terdapat lima unsur pengendalian intern yang salah satunya adalah penilaian risiko. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko yaitu melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan menetapkan struktur pengendalian untuk menanganinya.

Namun faktanya, hampir sepuluh tahun sejak peraturan tersebut ditetapkan, jumlah instansi pemerintah yang sudah menerapkan manajemen risiko di lingkungan organisasinya masih minim baik dari segi payung hukum

yang lebih rinci maupun segala hal terkait implementasinya.

Penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah dapat dilihat dari tingkat maturitas SPIP sesuai PP 60 tahun 2008. Di Sulbar dari 7 pemerintah daerah baru 2 pemerintah daerah yang mencapai level 3 tingkat maturitas SPIPnya, hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah di Sulbar masih harus ditingkatkan.

Melihat urgensi penerapan manajemen risiko pada organisasi perangkat daerah di Sulbar, BPKP Sulbar mencetuskan sebuah Gerakan Menilai Risiko (GMR) sebagai satu terobosan penilaian risiko dengan pendekatan program kegiatan prioritas yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang.

GMR merupakan sebuah gerakan mengenali risiko dalam rangka menggugah kesadaran bahwa pengendalian akan risiko tidak lagi sekedar kewajiban namun menjadi suatu kebutuhan. Dengan gerakan ini diharapkan penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif dan tumbuh budaya sadar risiko (Risk Culture) pada setiap pegawai organisasi perangkat daerah di Sulbar.

Budaya sadar risiko merupakan perilaku semua personil berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko, persepsi terhadap risiko tersebut akan terefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil dan cara melakukan pekerjaan. Budaya sadar risiko sangat mempengaruhi suatu organisasi dalam mengelola proses bisnisnya. Warren Buffett pernah

berkata bahwa 'Risk comes from not knowing what you're doing'.

Ketika organisasi sadar apa yang sedang dikerjakan dan potensi risiko yang mungkin muncul, maka organisasi akan menjadi lebih siap menanganinya.

Manfaat sadar risiko ini seringkali baru dapat dinikmati ketika terjadi suatu kejadian. Bagi organisasi yang sudah mengelola risikonya dengan baik, tentu lebih siap dalam menghadapi setiap dampak dari kejadian risiko yang bisa berupa bencana yang berdampak besar. Sedangkan bagi yang belum mengelola dengan baik, mungkin hanya ada penyesalan yang datang terlambat.

Contoh nyata pengelolaan risiko dapat kita lihat pada penanganan gempa di dua negara yang sama-sama berpotensi gempa yaitu Jepang dan Indonesia. Dengan kekuatan gempa yang kurang lebih sama ternyata dampak dari gempa bisa jauh berbeda. Misalnya pada gempa berkekuatan 7,3 SR di daerah Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang Selatan korban mencapai puluhan jiwa dengan 44 ribu orang dalam pengungsian. Bandingkan dengan Indonesia pada gempa Yogyakarta yang berkekuatan 5,9 SR tahun 2006 yang menyebabkan lebih dari 6 ribu orang meninggal dunia. Atau pada gempa berkekuatan 7,6 SR di Sumatera Barat pada 30 September 2009 yang menyebabkan lebih dari 1.100 jiwa meninggal.

Apa yang menyebabkan dampak pada kedua negara ini begitu berbeda? Jawabannya kesadaran akan risiko. Budaya ini mempengaruhi kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi

gempa.

Penanganan risiko di Jepang sudah disiapkan dengan baik seperti adanya sistem peringatan dini, standardisasi bangunan yang tahan gempa, pelatihan bencana yang dilakukan secara intensif, alokasi anggaran yang cukup untuk penanganan bencana, serta peran aktif pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Budaya sadar risiko ini bukan untuk membuat organisasi bebas dari risiko tapi untuk mendorong seluruh insan organisasi agar mengerti risiko itu harus dikelola sampai dengan batas toleransi yang diambil.

Manajemen risiko memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur yang proaktif dan antisipatif atas potensi peristiwa yang mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Melalui manajemen risiko, organisasi akan mendisiplinkan diri dalam mengendalikan risiko.

Peran sektor publik sangatlah besar dan juga efeknya yang massif, buruknya kinerja sektor publik akan berpengaruh signifikan kepada masyarakat dan negara, sehingga implementasi manajemen risiko sektor publik sangat membutuhkan peran aktif semua anggota organisasi mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh pegawai.

Sumber daya perlu dikerahkan agar manajemen risiko dapat berjalan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam pencapaian sasaran kinerja. Budaya sadar risiko bukan hanya milik pimpinan namun seluruh pegawai karena hakikatnya *Everybody is a Risk Manager.* (***)